

Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Desa Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun

Cindy Ayu Lestari ¹⁾; Khoiratul Ummah ²⁾; Nurul Azmy Pratiwi ³⁾; Julia Ivanna ⁴⁾

¹⁾*Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan*

^{2,3,4)}*Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan*

Email: ¹⁾ cindyayulestari43@gmail.com; ²⁾ 41215ummah@gmail.com; ³⁾ nurulazmy185@gmail.com;

⁴⁾ juliaivanna@unimed.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [23 Mei 2023]

Revised [26 Juni 2023]

Accepted [05 Juli 2023]

KEYWORDS

Public Policy, Role of Government, Infrastructure

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Desa Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Faktor yang menjadi penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten simalungun adalah keterbatasannya anggaran atau dana yang tersedia sedangkan pembangunan yang akan dilakukan cukup besar dan luas dengan keterbatasan anggaran yang tersedia jadi pembangunan tidak lancar. Dan juga kurangnya perhatian pemerintah simalungun dan pemeliharaan jalan secara berkelanjutan. Dengan adanya kerusakan jalan seperti dapat menghambat perjalanan dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, diharapkan pemerintah daerah atau dinas terkait untuk segera menindak lanjuti hal tersebut.

ABSTRACT

The purpose of this study was to see how the Government's Role in Overcoming Damage to Road Infrastructure in Bah Tobu Village, Dolok Batu Nanggar District, Simalungun Regency. The research method used is descriptive research using qualitative methods. The results of this study are that the inhibiting factor in the construction of road infrastructure in Simalungun Regency is the limited budget or available funds, while the development that will be carried out is quite large and extensive with limited budgets available, so the development is not smooth. And also the lack of attention from the Simalungun government and sustainable road maintenance. With road damage such as being able to hamper travel and can cause traffic accidents, it is hoped that the regional government or related agencies will immediately follow up on this matter.

PENDAHULUAN

Tulisan ini dimulai dari kegundahan hati mengenai hal bagaimana pemerintah menanggulangi kerusakan infrastruktur jalan yang berada di desa Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar. Permasalahan kerusakan jalan pada desa Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar banyak jalanan yang telah rusak atau ada sebagian jalan yang telah diperbaruhi tetapi kualitas jalanan tersebut sangat rendah. Ditambah lagi jalan utama menuju desa tersebut juga sudah rusak. (Ratnasari, 2017)

Bah Tobu sebuah desa di kecamatan Dolok Batu Nanggar kabupaten Simalungun, provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Bah Tobu adalah nama desa yang berasal dari kata Bah dan Tobu. Bah berarti air sedangkan Tobu berarti manis. Jika di gabungkan maka arti dari nama desa Bah Tobu ini adalah air tebu. Penetapan berdirinya desa Bah Tobu hingga kini masih menjadi misteri. Demikian pula proses hiterigenis masyarakat di desa Bah Tobu juga tidak ada panduan sejarah baik lisan maupun tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan. Namun perbedaan suku dan agama di desa ini justru menjadi suatu hal yang patut diacungi jempol sebab masyarakat hidup rukun dan damai dengan segala perbedaan yang ada. Jumlah penduduk desa Bah Tobu sebanyak 3.134 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.640 jiwa dan perempuan sebanyak 1.494 jiwa dengan 983 kepala keluarga. Mata pencaharian warga di desa ini sebagai karyawan swasta, pegawai negeri sipil, petani, dan peternak. Dengan tingkat pendidikan paling banyak yaitu tamat SD sekitar 1.648 jiwa.

Infrastruktur pada dasarnya merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Prinsipnya ada dua jenis infrastruktur, yakni infrastruktur pusat dan daerah. Pembangunan infrastruktur di desa Kalimas cukup baik dan pemerintahan desa juga selalu mengadakan musyawarah sebelum dilakukannya pembangunan guna untuk mengetahui kebutuhan masyarakat agar pembangunan yang dilakukan sungguh bermanfaat bagi masyarakat.

Jalan raya merupakan infrastruktur penting yang menunjang berbagai kegiatan masyarakat, terutama kegiatan transportasi. Kerusakan jalan raya tak bisa dilepaskan dari kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah terkait. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan kebijakan publik

pemerintah kota Serang dalam pemenuhan pelayanan infrastruktur (jalan raya) dan permasalahan sosial yang terjadi serta partisipasi masyarakatnya dalam pembangunan infrastruktur. (Ngongano & Tinggogoy, 2016)

Perkembangan mengenai tindak lanjut infrastruktur yang rusak di desa Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar. Asumsi yang terbentuk seolah olah pemerintah dolok khususnya pemerintah desa tobu tidakberperan aktif dalam menanggulangi permasalahan infrastruktur jalan yang rusak di desa Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar menimbulkan pertanyaan “Apakah memang benar pemerintah tidak mempunyai kebijakan apapun tentang permasalahan pada infrastruktur ini?

Dengan Melihat dari permasalahan yang diangkat, maka penelitian ini bertujuan untuk bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi di desa Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar dana pa factor penghambat dalam pembangunan infrastruktur.

LANDASAN TEORI

Pengertian Kebijakan Publik

Pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menumbuhkan dan memperbaiki sistem dan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pembangunan dilaksanakan oleh berbagai masyarakat yang mempunyai kepentingan dan memiliki kesinambungan dengan tujuan tertentu. Aktivitas pembangunan yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat dan juga pihak swasta dilakukan secara terus menerus untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Menurut Tachjan di (Herdiana, 2018) bahwa substansi kebijakan hakikatnya merupakan kesepakatan dari suatu keputusan dari beberapa rangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain. Kebijakan pada dasarnya ialah suatu kegiatan dari pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat maupun publik.

Untuk menciptakan pembangunan yang optimal, pemerintah menciptakan beberapa kebijakan yang nantinya digunakan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan utama dan menyelesaikan masalah di masyarakat. Lahirnya suatu kebijakan publik tidak lain karena ada landasan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Tidak lain kegunaan kebijakan publik diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang pada awal kebijakan ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*) (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Kebijakan publik oleh (Anggara, 2014) diartikan sebagai suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak orang.

Keberadaan kebijakan publik di negara modern memiliki fokus utama yakni pelayanan publik, dimana prioritas dari pencapaian negara terhadap pertahanan dan peningkatan kualitas hidup lebih diutamakan dan diunggulkan. Tidak hanya berfokus pada pelayanan publik, namun kebijakan publik harus bisa mengakomodasi berbagai kepentingan dan menyatukan kepentingan yang banyak untuk mencapai prioritas dan urgent dalam menata kepentingan yang lebih umum.

Selanjutnya menurut (Anggara, 2014) kebijakan menjadi suatu konsep meliputi beberapa hal berikut ini :

- a. Ketetapan, ketentuan-ketentuan yang memiliki pengaruh mengikat pada suatu kebijakan.
- b. Maksud, terciptanya suatu kebijakan ialah untuk mencapai tujuan tertentu serta mengatasi berbagai permasalahan yang muncul.
- c. Keputusan yang bisa dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan suatu kepentingan.
- d. Suatu proses pelaksanaan dari hal-hal yang telah ditetapkan. (Rodiyah et al., 2022)

Infrastruktur

Pengertian Infrastruktur menurut *American Public Works Association* (Stone, 1974 Dalam Kodoatie, R., 2005), adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayananpelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Sedangkan definisi lain infrastruktur menurut peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun

2015, infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. (Afriani, 2014)

Pengertian infrastruktur merujuk pada sistem fisik dalam menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain seperti listrik, telekomunikasi, air bersih dsb, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988; Fadel Muhammad 2004). Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 1988; Fadel Muhammad 2004).

Menurut Arthur Lewis, (1994;114) Prasarana (Infrastructure) bisa dengan aman mengikuti investasi yang lain. Sebagai contoh, jika investasi industri naik, akan terdapat penekanan akan penyediaan listrik dan fasilitas pengangkutan. Orang-orang yang bertanggung jawab atas fasilitas umum harus memperhatikan naiknya kebutuhan, dan karena bisnis itu baik, tidak akan mendapat kesulitan dalam memperoleh dana untuk membiayai perluasan sistem. Sementara itu, prioritas yang kurang penting (terutama kebutuhan konsumen domestik) sudah tersingkir karena tidak adanya suplai tetapi investasi utama tidak mungkin dibuat tetap. (Posumah, 2015)

Kata infrastruktur yang termuat dalam Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia diartikan sebagai "sarana" (1993, h.79). Sedangkan menurut Fajar Suryanto (2009), infrastruktur ialah suatu rangkaian yang terdiri atas adanya berbagai bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Misalnya jaringan jalan, dimana jalan merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti: Pemukiman, perdagangan, kawasan industri, wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga setiap kali terjadi pembangunan Infrastruktur memang diperlukan secara mendalam dan aktif antar institusi terkait agar kemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdayaguna tinggi serta nyaman bagi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur tentu berdasarkan atas sebuah gagasan, yang dimana memiliki maksud dan tujuan yang harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Keberhasilan sebuah pembangunan infrastruktur yaitu dapat diukur dari sejauh mana pemanfaatan dan dampaknya terhadap dinamika pembangunan ekonomi masyarakat meningkat. Hubungan fungsi antara infrastruktur yang ada sangat menentukan tingkat kemanfaatannya. Menurut Fajar Suryanto (2009), infrastruktur dapat digolongkan kedalam beberapa kategori antara lain :

- a. Obyek Rahasia: gedung pusat pemerintahan, pusat penelitian, instansi militer, instansi polisi, BIN.
- b. Obyek vital: pusat & jaringan listrik, pusat & jaringan komunikasi, pusat perdagangan, pusat eksplorasi, pusat konsentrasi masyarakat, bendungan, sarana & prasarana transportasi, sentra sembilan bahan pokok, kawasan industri.
- c. Obyek strategis: pabrik alat tempur militer, pabrik obat-obatan, radar pengamat, garis perbatasan.
- d. Obyek umum: bangunan fasos & fasum (pendidikan, peribadatan, tempat hiburan, taman, jalur hijau dll). (Berlin et al., n.d.)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif, di mana data dan informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan tinjauan langsung ke lapangan yang dianalisis secara kualitatif, untuk kemudian diinterpretasikan sesuai dengan makna yang terkandung dalam data dan informasi yang diperoleh. dengan mengambil lokasi di desa Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam menanggulangi kerusakan infrastruktur jalan di desa Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Dan Pembahasan

Bah Tobu sebuah desa di kecamatan Dolok Batu Nanggar kabupaten Simalungun, provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Bah Tobu adalah nama desa yang berasal dari kata Bah dan Tobu. Bah berarti air sedangkan Tobu berarti manis. Jika di gabungkan maka arti dari nama desa Bah Tobu ini

adalah air tebu. Penetapan berdirinya desa Bah Tobu hingga kini masih menjadi misteri. Demikian pula proses hiterigenis masyarakat di desa Bah Tobu juga tidak ada panduan sejarah baik lisan maupun tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan. Namun perbedaan suku dan agama di desa ini justru menjadi suatu hal yang patut diacungi jempol sebab masyarakat hidup rukun dan damai dengan segala perbedaan yang ada. Jumlah penduduk desa Bah Tobu sebanyak 3.134 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.640 jiwa dan perempuan sebanyak 1.494 jiwa dengan 983 kepala keluarga. Mata pencaharian warga di desa ini sebagai karyawan swasta, pegawai negeri sipil, petani, dan peternak. Dengan tingkat pendidikan paling banyak yaitu tamat SD sekitar 1.648 jiwa.

Program Otonomi Daerah memberikan peluang yang cukup besar bagi Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kinerja melalui penggunaan semua sumber daya yang dimilikinya dengan kepemilikan wewenang yang lebih besar dalam penentuan kebijakan di daerah. Pada konteks ekonomi daerah yang ditandai dengan kemampuan self-supporting nya organisasi daerah, instansi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang mempunyai peran yang sangat penting sebagai instansi yang melaksanakan dan mengawal pembangunan infrastruktur di daerah. UU No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan merupakan tugas utama dari sosok aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas aparatur sebagai pelayan harus lebih mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan msyarakat, dan memberi kepuasan publik. (Guanabara et al., n.d.)

Infrastruktur memiliki peran dan fungsi penting untuk memenuhi dan terselenggaranya kebutuhan dasar manusia secara fisik, social dan ekonomi yaitu memfasilitasi pergerakan barang dan jasa, manusia dan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya; roda penggerak pertumbuhan ekonomi, efisiensi biaya produksi (mengurangi ekonomi biaya tinggi), meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membuat kualitas lingkungan hidup menjadi baik Jadi terpenuhinya infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat maka kegiatan fisik, ekonomi, dan sosial masyarakat dapat berjalan serasi dan seimbang serta terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang Kabupaten Simalungun adalah sebuah instansi pemerintah untuk menunjang upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur yang baik dan unsur pelaksanaan otonomi daerah. Dinas PUPPR mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pemerintah di bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Air yang berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugasnya pegawai Dinas Pekerjaan Umum terbagi menjadi dua karakteristik pekerjaan yaitu pegawai yang bekerja di kantor dan pegawai yang bekerja di lapangan. Pegawai yang bekerja di kantor memiliki tugas salah satunya dalam membuat surat perizinan atau merekomendasikan perizinan di bidang pekerjaan umum, administrasi keuangan, pengolahan dan perencanaan program dan lain sebagainya, sedangkan pegawai yang bekerja di lapangan memiliki tugas untuk terjun secara langsung sebagai pelaksana, pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas PUPPR mempunyai fungsi sebagai perumusan perencanaan kebijakan teknis pembangunan, pengelolaan pekerjaan, pengawasan dan pengendalian pekerjaan dari masing-masing bidang yang ada.

Peran pemerintah harus lebih bertanggung jawab dalam melaksankan usaha-usaha dalam pengelolaan sumber daya dalam menanggulangi kerusakan infrastruktur jalan di kabupaten simalungun. Dalam hal tersebut pemerintah Kabupaten simalungun terkait dengan Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama ini sudah melaksanakan dan selalu melakukan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara. Namun pada kenyataannya jalan yang ada di Kabupaten simalungun khususnya di desa bah tobu masih memiliki kualitas yang jelek. Karena jalan yang ada di Kabupaten simalungun penanganannya berbeda-beda dan kerusakan jalan itu terbagi-bagi jenis kerusakannya, jadi penanganannya dilihat dari jenis kerusakannya.

Dalam penyediaan fasilitas pembangunan dapat dilihat terdahulu pembangunan seperti apa yang akan dikerjakan karena dalam pembangunan infrastruktur jalan berbeda-beda penanganannya, maka dari itu dikenali dahulu pembangunannya kemudian disediakan fasilitasnya yang dibutuhkan. Namun dalam pembangunan yang proyek yang besar dapat menggunakan rekanan kerja atau orang ketiga dalam pembangunan. Dan rekanan kerja yang akan melakukan pengawasan dan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan di lokasi proyek tersebut. (Nilawati et al., 2021)



Faktor yang menjadi penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten simalungun adalah keterbatasannya anggaran atau dana yang tersedia sedangkan pembangunan yang akan dilakukan cukup besar dan luas dengan keterbatasan anggaran yang tersedia jadi pembangunan tidak lancar. Dan juga kurangnya perhatian pemerintah simalungun dan pemeliharaan jalan secara berkelanjutan. Dengan adanya kerusakan jalan seperti dapat menghambat perjalanan dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, diharapkan pemerintah daerah atau dinas terkait untuk segera menindak lanjuti hal tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Faktor yang menjadi penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten simalungun adalah keterbatasannya anggaran atau dana yang tersedia sedangkan pembangunan yang akan dilakukan cukup besar dan luas dengan keterbatasan anggaran yang tersedia jadi pembangunan tidak lancar. Dan juga kurangnya perhatian pemerintah simalungun dan pemeliharaan jalan secara berkelanjutan. Dengan adanya kerusakan jalan seperti dapat menghambat perjalanan dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, diharapkan pemerintah daerah atau dinas terkait untuk segera menindak lanjuti hal tersebut.

Tugas pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan kepada rakyat. Selama masyarakat belum mampu menyelenggarakan urusan atau kebutuhannya secara manusiawi, maka pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakannya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan.

Saran

Pemerintah kabupaten Simalungun perlu untuk memperhatikan pembangunan dan pemeliharaan jalan secara berkelanjutan agar beberapa daerah di kabupaten Simalungun khususnya di Desa bah tobu kecamatan dolok batunanggar dapat terbuka akses dalam distribusi barang jasa dan transportasi dalam kegiatan ekonomi masyarakat sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat di kabupaten Simalungun.

DAFTAR PUSTAKA

- Kodoatie, R. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Cetakan pertama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, Hal 9
- Ratnasari, L. (2017). KEBIJAKAN PUBLIK: PERAN PEMERINTAH KOTA SERANG DALAM PELAYANAN INFRASTRUKTUR (Studi Kasus Mengenai Kerusakan Jalan Ciwaru Raya). *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA*.
- Afriani, L. (2014). Pengertian Tanah. *Graha Ilmu*, 87, 1–2.
- Berlin, Y., Noor, I., & Siswidiyanto. (n.d.). *Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo*. 3(1), 67–72. <https://media.neliti.com/media/publications/80910-ID-pelaksanaan-pembangunan-infrastruktur-pa.pdf>
- Guanabara, E., Ltda, K., Guanabara, E., & Ltda, K. (n.d.). *Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang Dalam Meningkatkan Pembangunan di Wilayah Kabupaten Simalungun*. 1–45.
- Ngongano, Y., & Tinggogoy, D. (2016). Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan. *Jurnal Penelitian Ilmu Administrasi Negara*, 4(1), 64–75.
- Nilawati, Mahsyar, A., & Tahir, M. (2021). *Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Bone*. 2, 1859–1873. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Posumah, F. (2015). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien*, 15(2), 1–13.

Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik. *Umsida Press*.
<https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/view/1308>